



Kenapa ada akuntabilitas?

- Satu paket dengan good governance
- Ada berbagai versi indikator good governance
- Akuntabilitas selalu ada

HASIL BELAJAR



Good Governance [Deklarasi Manila]

- **Transparan.**
- **Akuntabel**
- **Adil**
- **Wajar**
- **Demokratis**
- **Partisipatif**
- **Tanggap/peka/responsif**

INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Menjelaskan konsep akuntabilitas
2. Menjelaskan **mekanisme akuntabilitas**
3. Menjelaskan akuntabilitas dalam konteks
4. Mengaktualisasikan nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas

Good Governance [UNDP]

- Partisipasi
- Aturan hukum (*rule of law*)
- Transparansi.
- Daya tanggap (*responsiveness*)
- Berorientasi konsensus (*consensus orientation*)
- Berkeadilan (*equity*)
- Efektivitas dan efisiensi
- **Akuntabilitas**
- Bervisi strategis
- Saling keterkaitan (*interrelated*)

Dampak Good Governance [1]

Penelitian terhadap 169 negara

- Negara berkembang dengan tingkat korupsi sangat rendah, standar kehidupan 300% lebih tinggi vs negara korup
- Negara yang memerangi korupsi, akan mendorong peningkatan investasi luar negeri
- Dengan upaya yang keras, aksi pemberantasan korupsi akan memperlihatkan kemajuan yang nyata setelah 6 sampai 8 tahun.



$$C = M + D - A$$

C = Corruption

M = Monopoly of power

D = Discretion by officials

A = Accountability

Keleluasaan bertindak

Klitgaard et.al, dalam Agus Dwiyanto et.al, 2006

Dampak Good Governance

- Kepemerintahan yang baik meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat
- Tingkat kematian bayi berkurang 75%;
- Pertumbuhan usaha meningkat 3% per tahun

Sumber: Russell, 2005, Good Governance and Evident Base

SIMULASI

$$C = M + D - A$$

$$c = M + D - A$$

HARUS AKUNTABEL

GOOD GOVERNANCE
pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN)

DIPERLUKAN PERAN DARI



Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.

Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya

Akuntabilitas

- Mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya (*stakeholders*-nya) → amanah
- Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan (Deklarasi Manila)
- Memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
- Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external

[UNDP]



Ide dasar

- Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat
- Bagi organisasi publik, siapa yang memberikan amanat / mandat?
- Rakyat??



Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yakni menjamin terwujudnya nilai-nilai publik



Accountability is the duty to govern or manage.
Responsibility is the duty to complete work.

The main difference between **responsibility** and **accountability** is that responsibility can be shared while accountability cannot. Being accountable not only means being responsible for something but also ultimately being answerable for your actions. Also, accountability is something you hold a person to only **after** a task is done or not done. Responsibility can be before and/or after a task.

Accept responsibility
for your actions.
Be accountable for
your results.
Take ownership of
your mistakes.

AKUNTABILITAS PUBLIK



VERTIKAL

pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi,



HORIZONTAL

pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas

ASPEK-ASPEK AKUNTABILITAS



12/26/2019

20

TINGKATAN DALAM AKUNTABILITAS



TINGKAT AKUNTABILITAS

12/26/2019

23

3 FUNGSI UTAMA AKUNTABILITAS



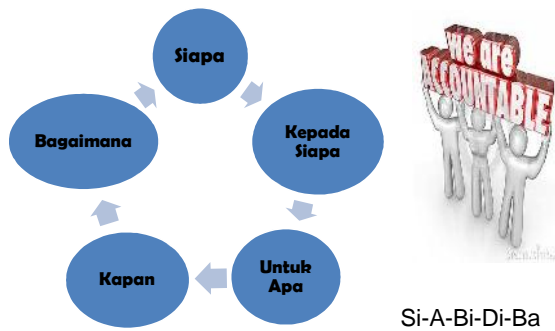
12/26/2019

21

10 qualities of accountable people

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Answer emails and requests | 06 Always be ethical |
| 02 Do what you promise | 07 Be honest and transparent |
| 03 Take responsibility for actions | 08 Demonstrate outcomes |
| 04 Proactively solve problems | 09 Review and evaluate to improve |
| 05 Don't blame or make excuses | 10 Show humility and apologise |

Mekanisme akuntabilitas



Akuntabilitas diberikan kepada siapa?

- Masyarakat (pelanggan)
- Pemerintah Pusat dan Daerah (termasuk dalam hal ini Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural dalam Birokrasi Pemerintah)
- Organisasi Kemasyarakatan/NGOs
- Organisasi pemerintah lainnya misalnya BUMN
- Lembaga penilai organisasi publik yang diatur dalam undang-undang

Mekanisme Akuntabilitas

- Pengembangan Mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk:
 - Kejelasan tugas dan peran
 - Hasil akhir yang spesifik
 - Proses yang transparan
 - Ukuran keberhasilan kinerja
 - Konsultasi dan inspeksi publik.

Lingkup akuntabilitas

- Pertanggungjawaban administrasi dan organisasi
- Pertanggungjawaban legal
- Pertanggungjawaban politik
- Pertanggungjawaban profesi
- Pertanggungjawaban moral

Mekanisme akuntabilitas

- Mekanisme akuntabilitas juga meliputi aspek yaitu **siapa** yang harus melakukan akuntabilitas, **kepada siapa** akuntabilitas ini dilakukan, **untuk apa** akuntabilitas dilakukan, **bagaimana** dan **prosesnya**.
- Mekanisme akuntabilitas ini sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh apakah keputusan atau aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikat organisasi secara internal atau eksternal

Jalan Pamulang Dua Rusak

[surat pembaca di <http://www.detik.com>]

- Wakil Bupati terpilih Bapak Rano Karno pada kampanye yang lalu berjanji akan memperbaiki Jalan Pamulang 2 yang merupakan akses menuju tol Jakarta.

Tetapi, pada kenyataannya rano karno belum memenuhi janji.

Pertanggungjawaban apa? [adm, legal, politik, moral]

Kebijakan Akuntabilitas Publik di Indonesia

- Tuntutan internal (Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin
 - Transparan
 - Mampu mempertanggungjawabkan atas berbagai kebijakan dan tindakan
- Perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan *Good Governance* dan *Performance Management*

ALAT AKUNTABILITAS BIROKRASI INDONESIA



Kebijakan

- Dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan
- UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. meliputi:
 - Azas kepastian Hukum.
 - Azas tertib penyelenggaraan negara.
 - Azas kepentingan umum.
 - Azas keterbukaan.
 - Azas proporsionalitas.
 - Azas profesionalitas.
 - **Azas akuntabilitas**

Inpres Nomor 7 Tahun 1999

- Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia.
- Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja
- Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

MEKANISME AKUNTABILITAS

DIMENSI

Akuntabilitas kejujuran & hukum

Akuntabilitas proses

Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme

Akuntabilitas program

Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas

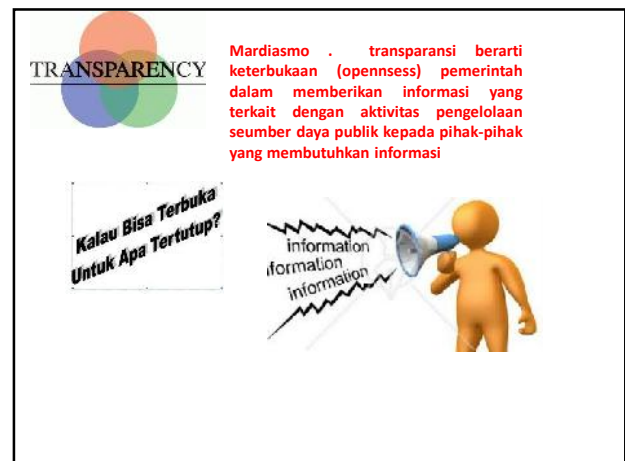
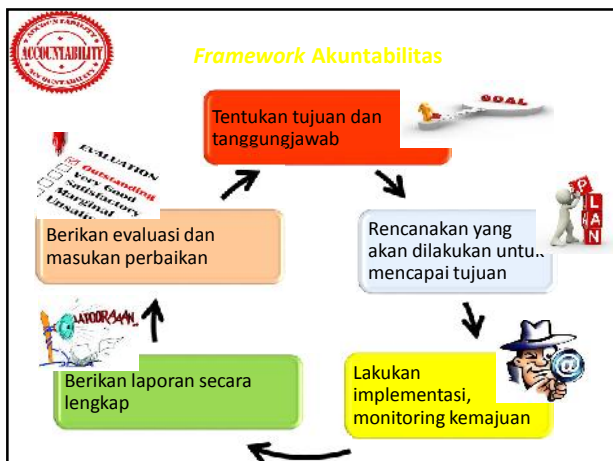
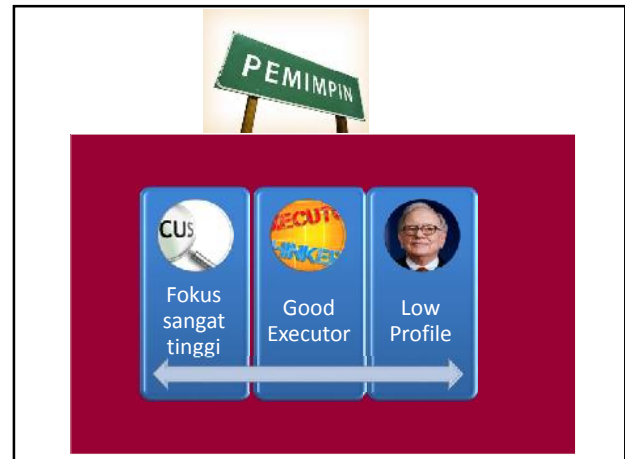
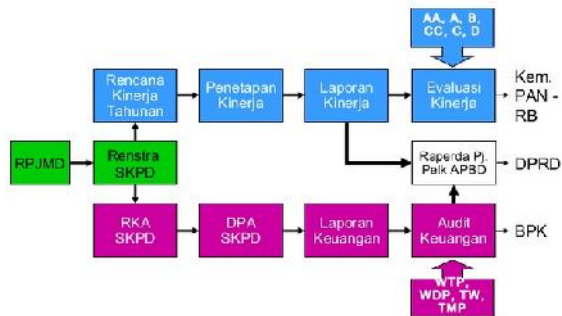
12/26/2019

33

Output akuntabilitas

- Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
- Pelayanan publik yang berkualitas
- Publik sudah membayar pajak kepada pemerintah, **akuntabilitasnya** dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas

HUBUNGAN LAKIP-LAP.KEUANGAN

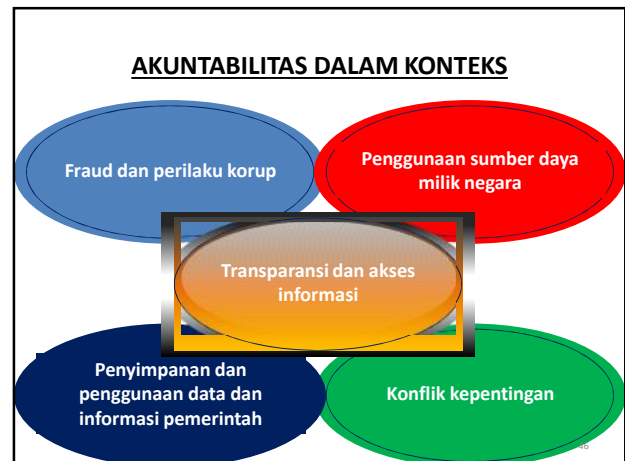




Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya




“Orang yang paling menyedihkan adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya.”


Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993).




Suatu Hubungan Khusus Bukan masalah dengan Perbedaan Usia, Tidak masalah dengan Jarak, Tidak masalah dengan Komunitas.

Yang Paling Penting adalah **KEPERCAYAAN** dan **KESETIAAN** Kepercayaan Wanita terhadap Pria, dan kesetiaan Seorang Pria kepada Wanita...

PRAKTEK KECURANGAN DAN PERILAKU KORUP



BOCOR LAGI, BOOOOR LAGI ...!

Gratifikasi KKN

30%-50% DANA PENGADARAN BARANG APEND

Komisi Sumbangan

Pemalsuan Suap

Penggelapan Pemerasan

Melawan Hukum

Penyalahgunaan Wewenang



keadaan seimbang;
Fisika keadaan yg terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yg ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yg sama, tetapi berlawanan



Kejelasan
Kejelasan
Kejelasan
Kejelasan
Kejelasan

terang; nyata; gamblang; tegas; tidak ragu-ragu atau bimbang
kejelasan keadaan jelas


“Sebaik – baik perkataan itu adalah yang mengandung sedikit kejelasan.”



Fraud ↔ Kecurangan

Mengapa terjadi.....????

1. Peluang untuk melakukan
2. Insentif atau tekanan
3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud





tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance perusahaan*, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal



Transparansi dan akses informasi



Kategori Informasi Publik:

- Yang wajib disediakan dan diumumkan
- Yang dikecualikan/Bersifat Rahasia

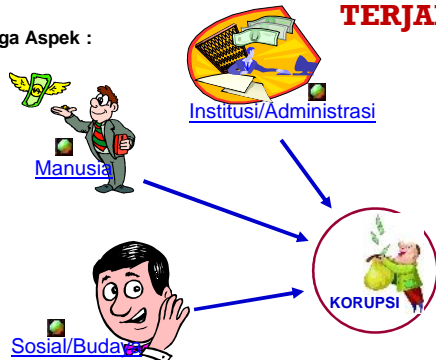
Prinsip-prinsip keterbukaan informasi:

- Maximum Access Limited Exemption (MALE)
- Permintaan tanpa disertai alasan
- Mekanisme sederhana, murah, cepat
- Informasi harus utuh dan benar
- Informasi proaktif
- Perlindungan pejabat yang beritikad baik

52

MENGAPA KORUPSI TERJADI

Tiga Aspek :



- Semua penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku
- Menggunakannya secara bertanggung-jawab, efektif dan efisien
- Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab.



Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Praktek Kecurangan

- 1)Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi;
- 2)Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif;
- 3) Perekrutan dan Promosi Pegawai;
- 4)Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan;
- 5) Menciptakan Saluran Komunikasi yang Efektif;
- 6) Penegakan Kedisiplinan;
- 7) Menciptakan Kerjasama Pengawasan

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah

organisasi akuntabel adanya proses kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya.

Informasi dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan.

Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus *relevant* (relevan), *reliable* (dapat dipercaya), *understandable* (dapat dimengerti) serta *comparable* (dapat diperbandingkan)



54

Konflik Kepentingan



PNS DIHARAPKAN AKUNTABEL (Personal Behavior)

- Bertindak sesuai aturan, kebijakan, dan kode etik
- Tidak mengganggu, menindas, melakukan kekerasan dan diskriminatif thd rekan atau anggota masyarakat
- Bekerja secara profesional, menciptakan hubungan harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif
- Memperlakukan stakeholder dgn hormat, sopan santun, jujur, adil memperhatikan kepentingan mereka hak kesamaan dan kesejahteraan
- Membuat keputusan adil tidak memihak sesuai peraturan, kebijakan dan prosedur institusi
- Melayani stakeholder setiap saat dan selalu memberi masukan informasi dan kebijakan

Bagaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan:

Tugas publik dengan kepentingan pribadi

- Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau swasta yang mungkin bertentangan, atau dianggap bertentangan dengan kewajiban publik?

Potensialitas

- Mungkinkah ada manfaat bagi saya sekarang, atau di masa depan, yang bisa meragukan objektivitas saya?
- Bagaimana keterlibatan saya dalam mengambil keputusan / tindakan dilihat oleh orang lain?

Proporsionalitas

- Apakah keterlibatan saya dalam keputusan tampak adil dan wajar dalam semua keadaan?

Presence of Mind

- Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan?
- Bagaimana jika keterlibatan saya dipertanyakan publik?

Janji

- Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan?
- Apakah saya berdiri untuk menang atau kalah dari tindakan / keputusan yang diusulkan?

Perilaku terkait transparansi dan akses informasi

- Memegang kerahasiaan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi
- Tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi
- Mematuhi prosedur yang dipersyaratkan terkait dengan komunikasi dan informasi

PNS AKUNTABEL

- 1 Perilaku individu PNS yang baik
- 2 Perilaku Berkaitan dgn Transparansi dan Akses Informasi
- 3 Menghindari Perilaku Curang dan Koruptif
- 4 Perilaku thd Penggunaan Barang Negara
- 5 Perilaku Berkaitan dgn Data dan informasi pemerintah
- 6 Perilaku Berkaitan dengan Konflik kepentingan

Menghindari Perilaku Curang dan Koruptif

- X Penipuan atau Korupsi
- X Penipuan → Keuangan
- X Curang → Posisi, jabatan, kewenangan untuk kepentingan pribadi

✓ Melaporkan setiap perilaku curang atau korup

✓ Melaporkan setiap pelanggaran kode etik

✓ Memahami dan mengaktualisasikan "akuntabilitas"

Perilaku terkait penggunaan sumber daya negara

- Tanggung jawab terhadap pengeluaran resmi dan penggunaan SD yg bersumber dari publik secara teliti dan efisien
- Menggunakan pengeluaran terkait pekerjaan
- Tidak terlibat parpol dan keuntungan pribadi
- Mematuhi kebijakan dan pedoman dlm menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab
- Memastikan bahwa setiap perjalanan dinas memiliki tujuan resmi dan benar diperlukan
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien

61

KEPUTUSAN YANG AKUNTABEL

- ✓ Tindakan/keputusan berimbang/tidak bias
- ✓ Bertindak adil;
- ✓ Akuntabel dan transparan;
- ✓ Bekerja secara penuh, efektif dan efisien;
- ✓ Berperilaku sesuai dengan standar, kode dan etika;
- ✓ Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi konflik kepentingan

64

Perilaku terkait Conflict of interest

- Memastikan tidak ada pertentangan dan keberpihakan antara kepentingan Pribadi vs Publik
- Memahami potensi conflict of interest yang berpotensi muncul di masa depan tetap mengutamakan kepentingan umum
- Jika muncul konflik dapat melaporkan secara tertulis pada pimpinan
- Menjaga tidak terjadi konflik

62

Indikator Akuntabilitas

1. Kepemimpinan
2. Transparansi
3. Integritas
4. Tanggung jawab
5. Keadilan
6. Kepercayaan
7. Kejelasan
8. Konsistensi
9. Menghindari Fraud dan Korupsi
10. Penggunaan SDMN
11. PPDIP
12. Menghindari Konflik Kepentingan
13. Laporan

Supaya Akuntabel Dan Responsif

- Membuat saluran untuk menampung keluhan konsumen
- Membuat saluran untuk menampung saran-saran konsumen
- Melakukan survei konsumen
- Melakukan kontak atau pertemuan dengan konsumen
- Membuat forum untuk memperoleh masukan kualitatif dari konsumen, misalnya membentuk forum konsumen



63